

ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

Oleh : SRI PALUPI

ABSTRAK

Dalam rangka memanfaatkan teknologi yang dinilai dapat meningkatkan layanan pertanahan, khususnya mengenai hak tanggungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yang baru-baru ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Pemberlakuan layanan Hak Tanggungan secara serentak diseluruh Indonesia memunculkan berbagai macam persoalan terutama kendala yang dihadapi oleh para pengguna layanan hak tanggungan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Analisis (*analytical approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah PPAT di wilayah Kabupaten Bekasi memiliki peran antara lain membuat Akta pemberian Hak Tanggungan dan menyampaikan APHT tersebut bersama dokumen-dokumen kelengkapan lainnya yang berkenaan dengan pemberian hak tanggungan. Perlindungan hukum bagi Pejabat PPAT dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi adalah Perlindungan yang bersifat preventif atau disebut bentuk perlindungan hukum yang sifatnya mencegah bagi pejabat PPAT dan masyarakat dan perlindungan refresif, yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik terhadap pejabat PPAT dan/atau masyarakat.

Kata Kunci : Peran dan Tanggungan Jawab PPAT, Pendaftaran Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Elektronik.

**ANALYSIS OF THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF PPAT IN THE
IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC RESPONSIBILITY
REGISTRATION POLICY IN BEKASI REGENCY**

By : SRI PALUPI

ABSTRACT

In order to utilize technology that is considered to be able to improve land services, especially regarding mortgages, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency stipulates Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 9 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services, which has recently been revoked. and declared no longer valid based on Article 37 of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services. The implementation of mortgage services simultaneously throughout Indonesia raises various kinds of problems, especially the obstacles faced by users of electronic mortgage services. Based on this, the authors are interested in conducting research. The type of research used by the author in this study is a normative juridical research method using a statute approach and an analytical approach. The conclusion of this study is that PPAT in the Bekasi Regency area has a role, among others, making a Deed of granting Mortgage and submitting the APHT along with other complete documents relating to the granting of Mortgage. Legal protection for PPAT officials and the public in the Bekasi Regency area is preventive protection or is called a form of preventive legal protection for PPAT officials and the community and repressive protection, which functions to resolve problems that occur both to PPAT officials and/or the community.

Keywords: PPAT Roles and Responsibilities, Mortgage Registration, Electronic Mortgage Rights.